

LAPORAN KINERJA (LKJ) INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2017



Gedung Serba Guna Lt. 2 Jln. Trikora No. 1 Banjarbaru Selatan
Telp. (0511) 4780069

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2017. Pengukuran kinerja didasarkan pada hasil penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2017.

Penyusunan Lkj Inspektorat Kota Banjarbaru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016, Inspektorat mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai unsur pengawas, Inspektorat memiliki tugas pokok membantu Walikota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengukuran atas Perjanjian Kinerja 2017 (Revisi), hasilnya menunjukkan realisasi yang melampaui dari target yang telah ditetapkan. Empat dari 5 (lima) IKU memiliki capaian kinerja melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tahun 2017 diharapkan sebagai alat kendali dan pemacu untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru. Selain itu, diharapkan juga secara tidak langsung mampu ikut serta berkontribusi meningkatkan kinerja SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.

Banjarbaru, 31 Januari 2018

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19700615 199003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Ringkasan Eksekutif	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Aspek Strategis Organisasi	5
1.5. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan	6
1.6. Strategi dan Kebijakan Pengawasan	6
1.7. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	13
3.2 Akuntabilitas Kinerja	14
3.2.1 Ikhtisar Kinerja	14
3.2.2 Evaluasi Kinerja	16
BAB 4 PENUTUP	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel RE 1 Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017	vi
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Kepangkatan	4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2017	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2017 (Revisi)	11
Tabel 2.3 Program dan Anggaran Tahun 2017	12
Tabel 3.1 Predikat Penilaian Capaian Kinerja	13
Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017	14
Tabel 3.3 Predikat Capaian Kinerja Tahun 2017	15
Tabel 3.4 Bobot Penilaian SAKIP SKPD	16
Tabel 3.5 Peringkat Penilaian Evaluasi SAKIP	17
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.....	20
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2.....	23
Tabel 3.8 Realisasi Capaian Kinerja IKU 3.....	26
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3	27
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi IKU 3	28
Tabel 3.11 Fokus Evaluasi Maturitas SPIP	29
Tabel 3.12 Gradasi Tingkat Maturitas SPIP	30
Tabel 3.13 Nilai Maturitas SPIP Kota Banjarbaru Setelah Bimtek Penilaian Risiko	31
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4.....	32
Tabel 3.15 Matriks Model Kapabilitas APIP	35
Tabel 3.16 Capaian Kinerja IKU 5	37
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program	39
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	39
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan.....	39
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU	3
Gambar 1.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Banjarbaru.....	7
Gambar 3.1 Hasil Penilaian SAKIP SKPD Tahun 2017.....	18
Gambar 3.2 Status Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	22
Gambar 3.3 Realisasi Kinerja IKU 2 Tahun 2017	23
Gambar 3.4 Trend Realisasi Kinerja IKU 2	24
Gambar 3.5 Jumlah Temuan Eksternal Tahun 2016 & 2017	26
Gambar 3.6 Capaian IKU 4 Tahun 2017	32
Gambar 3.7 Persentase Realisasi Keuangan Per Program	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai visi “Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas”. Dalam rangka melaksanakan visi tersebut, Inspektorat Kota Banjarbaru mengemban misi “Melaksanakan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi Informasi”.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, ditetapkan dua tujuan, yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Meningkatkan Akuntabilitas Profesionalisme APIP Kota Banjarbaru. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari ditetapkannya 5 sasaran strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur atas capaian keberhasilan atau kegagalan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa 5 IKU tersebut telah memenuhi target kinerja tahun 2017. Bahkan, 4 dari 5 IKU melampaui target yang telah ditetapkan. Secara ringkas capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel RE 1
Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1	140,74%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan	105,50%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	185,20%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya implementasi 5 unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh SKPD	Level Maturitas SPIP Kota Banjarbaru	103,68%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	Level Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	100%	Sangat Memuaskan

Secara umum, kinerja yang melampaui target didukung oleh proaktifnya APIP melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SKPD. Hal tersebut sesuai dengan Misi Inspektorat untuk meningkatkan Peranan APIP Kota Banjarbaru sebagai *Quality Assurance*. Walaupun melampaui target kinerja pada tahun 2017, diharapkan dapat terus memacu kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Sehingga, diharapkan pada akhir tahun Renstra mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2009 Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Instansi Pemerintah mengamanatkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj). LKj kemudian didefinisikan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Lebih lanjut Permepan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pelaporan kinerja disusun dengan maksud mencapai dua tujuan. Tujuan pertama untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan kedua sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatnya kinerjanya.

Oleh karena itu, LKj ini disusun untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru selama tahun 2017. Selain itu, laporan kinerja disusun untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru untuk periode yang akan datang.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok

membantu Walikota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
3. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
4. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan;
5. Fasilitator kegiatan pengawasan lintas sektor;
6. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
8. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

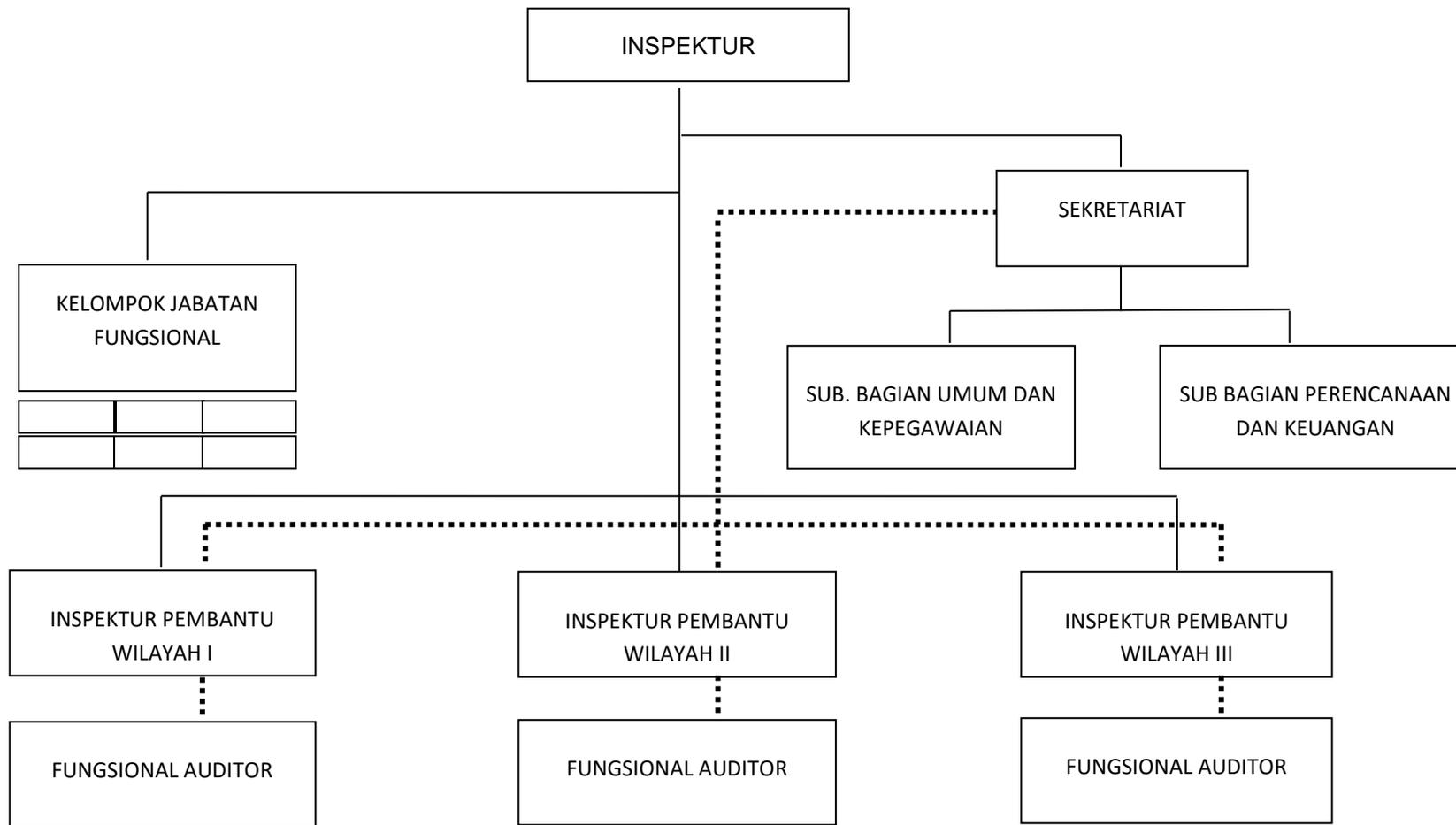
Sesuai dengan Renstra Inspektorat 2016-2021, Inspektorat melaksanakan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan yang dilaksanakan akan menghasilkan dokumen laporan yang berisi rekomendasi. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perwali No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru, Inspektur Kota Banjarbaru berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 56 TAHUN 2016
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2016



————— Garis Komado
 Garis Koordinasi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Banjarbaru didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Keadaan Pegawai Inspektorat Kota Banjarbaru per 31 November 2017 berjumlah 63 orang. Berikut ini dijabarkan jumlah pegawai menurut pendidikan, golongan/kepangkatan, dan jabatan.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN										
SD	SLTP	SLTA	DI	DII	D III	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-		3	-	-	5	-	44	11	-	63

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Kepangkatan

Golongan II					Golongan III					Golongan IV					PPT		Jlh
a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh		Jlh	
-	2	1	4	7	1	10	13	10	34	10	9	2	-	21	1	1	63

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
I.	Jabatan Struktural :	
1.	Inspektur (eselon II.b)	1 orang
2.	Sekretaris (eselon III.a)	1 orang
3	Irban (eselon III.a)	3 orang
4.	Kasubbag (eselon IV.a)	2 orang
II	Jabatan Fungsional :	
1	Auditor Keuangan	17 orang
2	Auditor Kepegawaian	3 orang
3	P2UPD	24 orang

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru, Inspektorat Kota Banjarbaru telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020. Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis berikut ini.

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD;
2. Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal (BPK);
3. Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatnya implementasi 5 unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh SKPD; dan
5. Meningkatnya kapabilitas APIP Kota Banjarbaru.

1.5. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dimana Inspektorat sebagai unsur pengawas pemerintah daerah dituntut untuk berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean governance*). Adapun permasalahan yang ditemui dalam sektor pengawasan di Kota Banjarbaru dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Masih banyak temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti;
2. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja dan pengendalian internal yang kurang baik;
3. Kualitas pelayanan publik masih harus ditingkatkan;
4. Prosedur pengawasan belum dijalankan dengan baik;
5. Komitmen dan motivasi APIP masih perlu ditingkatkan;

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis pada sektor pengawasan yaitu:

1. Tingkat kepatuhan SKPD terhadap peraturan & perundang-undangan masing sangat kurang;
2. Belum maksimalnya peran APIP sebagai pengawas internal pemerintah daerah;

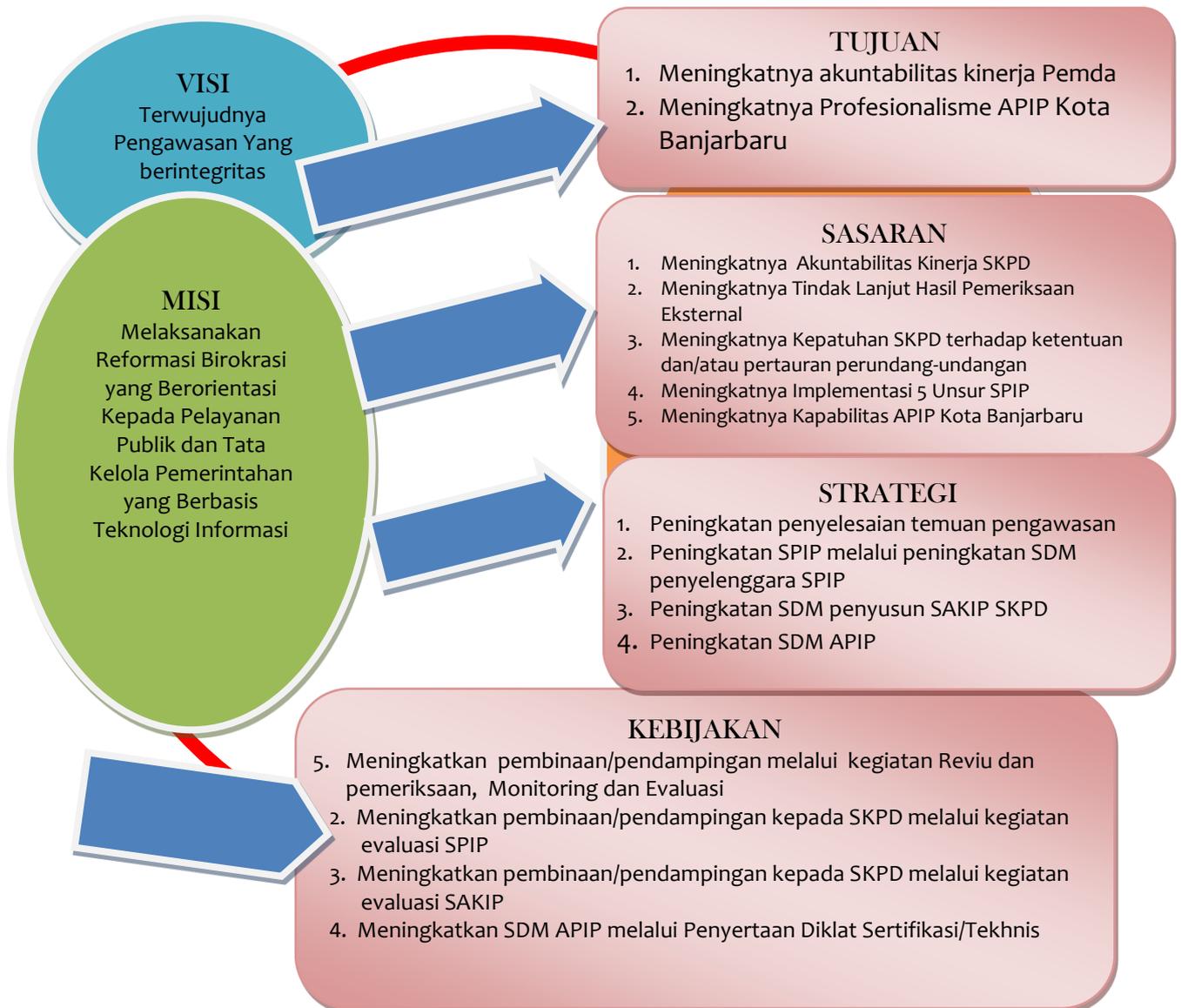
Untuk menjawab isu strategis tersebut, Inspektorat berupaya untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, hal ini diharapkan dapat menjawab isu strategis yaitu percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

1.6. Strategi dan Kebijakan Pengawasan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kota Banjarbaru selalu menjunjung semangat dan komitmen melaksanakan manajemen tata pemerintahan yang baik dan mewujudkan pembaharuan dan perbaikan dalam bidang pengawasan. Dan dalam rangka menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah, maka Inspektorat Kota

Banjarbaru telah membuat perencanaan yang dituangkan dalam RENSTRA Inspektorat periode 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yaitu :

Gambar 1.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Banjarbaru



1.7. Sistematika Penyajian

LKj Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016 disusun berdasarkan sistematika berikut ini.

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Perencanaan Kinerja
BAB III	Akuntabilitas Kinerja
	1. Capaian Kinerja Organisasi
	2. Realisasi Anggaran
BAB IV	Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PP No. 29 Tahun 2014 mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP salah satunya meliputi rencana strategis dan perjanjian kinerja.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dengan upaya peningkatan kinerja instansi yang bersangkutan.

Perencanaan strategis kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Rencana ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strategis serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu.

Selanjutnya disusun dokumen penetapan kinerja atau perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2017 setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan komitmen Inspektur kepada Walikota Banjarbaru untuk berkinerja, sesuai dengan apa yang diperjanjikan

berdasarkan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan Sumber daya yang dimiliki yaitu dalam tabel berikut ini. Berikut ini merupakan perjanjian kinerja tahun 2017 antara Inspektur dengan Walikota Banjarbaru per Februari 2017.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara/daerah	83,87%
		Persentase Rekomendasi hasil reuiu LKPD yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		Persentase SKPD yang tertib mengimplementasikan SAP dalam pengelolaan keuangan SKPD	100%
		Persentase SKPD yang telah tertib administrasi barang/asset daerah	83,87%
		Persentase SKPD yang memiliki RKA sesuai pedoman penyusunan RKA SKPD	100%
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal yang telah ditindaklanjuti	98,34%
		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Implementasi SPIP SKPD	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	46,87%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SKPD yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B	64,51%
5	Meningkatnya APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi/profesi	75,00%
		Persentase APIP yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi tekhnis/substantif	57,69%
6	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan Internal Yang ditindaklanjuti	100%
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	CC

		Persentase temuan Eksternal (BPK/Inspektorat Provinsi) yang ditindaklanjuti	100%
--	--	---	------

Pada September 2017, Inspektorat melakukan revisi atas IKU yang juga berakibat pada revisi Perjanjian Kinerja 2017. Hal tersebut berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas IKU Inspektorat yang tidak sesuai dengan Renstra 2016-2021 dan tidak selaras dengan RPJMD Kota Banjarbaru. Selain itu, revisi IKU dilakukan agar IKU lebih simple dan kemudahan dalam mencari data realisasi. Tahun Berikut ini merupakan revisi perjanjian kinerja tahun 2017 antara Inspektur dengan Walikota Banjarbaru.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2017 (Revisi)

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1	50% B
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan	70%
Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	10%
Level Maturitas SPIP Kota Banjarbaru	Berkembang
Level Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	Level 2

Dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kinerja tersebut sesuai dengan sasaran dan target IKU, maka diperlukan program sebagai langkah untuk mendukung tercapainya tujuan strategis. Program-program tersebut meliputi.

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Tahun 2017

No.	Nama Program	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 540.631.300
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 570.490.000
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 34.969.000
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 2.602.440.000
5	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 287.000.000
TOTAL		Rp 4.035.530.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam rangka penyusunan LKj Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2017, dilakukan pengumpulan data kinerja yang uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan. Pengumpulan data kinerja tahun 2017 diarahkan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat waktu, sehingga berguna untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu sebagai berikut.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan pengukuran atas capaian kinerja IKU, langkah selanjutnya yaitu pemberian kesimpulan atas capaian kinerja tersebut. Pemberian kesimpulan atas capaian kinerja IKU didasarkan pada Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat penilaian capaian kinerja terbagi ke dalam kategori-kategori predikat berikut ini.

Tabel 3.1
Predikat Penilaian Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja
(1)	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
(2)	> 70 - 80	Sangat Baik
(3)	> 60 - 70	Baik
(4)	> 50 - 60	Cukup
(5)	> 30 - 50	Kurang
(6)	0 - 30	Sangat Kurang

Evaluasi atas capaian indikator kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan/atau faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja. Faktor-faktor tersebut dipelajari dan dianalisis sehubungan dengan perbaikan kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru di masa yang akan datang. Selain itu, membandingkan antara realisasi dan target kinerja pada tahun berjalan, realisasi tahun berjalan dan realisasi dua tahun terakhir, serta target di masa akhir periode Renstra (tahun 2021).

3.2 Akuntabilitas Kinerja

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Banjarbaru selaku unsur pengawas intern pemerintah dapat disajikan dalam uraian berikut ini.

3.2.1 Ikhtisar Kinerja

Lkj Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan akuntabilitas kinerja tahun kedua dalam Renstra 2016-2021. Dalam Renstra periode 2016-2021, Inspektorat menetapkan dua tujuan yang kemudian dijabarkan dalam lima sasaran strategis dengan lima IKU sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun berjalan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2017 secara ringkas dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1	50% B	70,37% B	140, 74%
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan	70%	73,85%	105,50%

Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap ketentuan dan/atau peartauran perundang-undangan	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	10%	18,52%	185,20%
Meningkatnya implementasi 5 unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh SKPD	Level Maturitas SPIP Kota Banjarbaru	Berkembang	Terdefinisi	103,68%
Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	Level Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	Level 2	Level 2	100%

Berdasarkan capaian kinerja pada tabel 3.2, dapat diambil kesimpulan atas predikat capaian kinerja. Predikat capaian kinerja masing-masing IKU yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian	Predikat
Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1	140,74%	Sangat Memuaskan
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan	105,50%	Sangat Memuaskan
Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	185,20%	Sangat Memuaskan
Level Maturitas SPIP Kota Banjarbaru	103,68%	Sangat Memuaskan
Level Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	100%	Sangat Memuaskan

Secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2017 yang diukur berdasarkan 5 IKU memperoleh predikat “sangat memuaskan” dengan capaian kinerja melebihi target. Bahkan 4 dari

5 IKU melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rinci evaluasi atas capaian kinerja Inspektorat tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut.

3.2.2 Evaluasi Kinerja

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Banjarbaru diuraikan berdasarkan masing-masing sasaran strategis sebagai berikut.

ASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD”

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD” diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1. Indikator ini dipilih untuk menunjukkan penerapan SAKIP pada tingkat SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan pada tahun 2017 atas kinerja SKPD tahun 2016. Evaluasi dilakukan terhadap 5 (lima) komponen penilaian dari tahapan perencanaan sampai dengan capaian kinerja. Bobot penilaian evaluasi dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Bobot Penilaian SAKIP SKPD

Komponen Penilaian	Bobot	Sub Komponen Penilaian
Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%) Meliputi pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%), & implementasi Renstra (3%)
		b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) Meliputi Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), & Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)

Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)
Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang Dilaporkan/ output (5%) b. Kinerja yang Dilaporkan/ outcome (5%) c. Kinerja Tahun Berjalan/ benchmark (5%) d. Kinerja Lainnya (5%)

Bobot penilaian pada tabel 3.1 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyimpulan atas hasil reuiu terhadap akuntabilitas kinerja SKPD dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas SKPD yang bersangkutan terhadap kinerjanya. Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 tingkat akuntabilitas kinerja terbagi ke dalam kategori-kategori berikut ini.

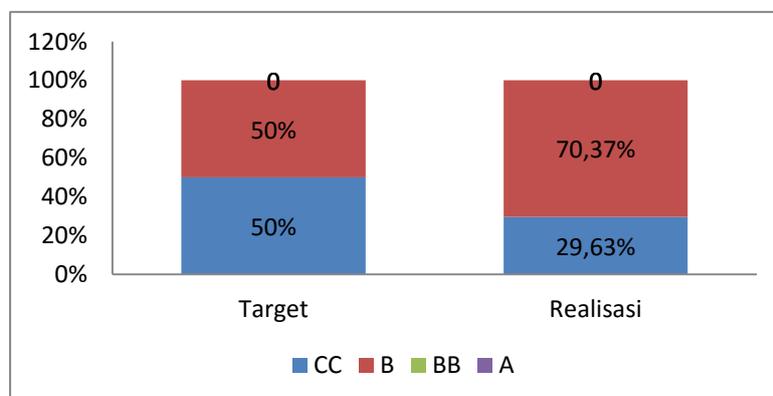
Tabel 3.5
Peringkat Penilaian Evaluasi SAKIP

No.	SKOR	NILAI	INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
2	> 80 - 90	A	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	> 70 - 80	BB	Sangat Baik

			Akuntabilitas berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	> 60 - 70	B	Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan
5	>50 - 60	CC	Cukup (Memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang mendasar
6	>30-50	C	Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	0 - 30	D	Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Hasil evaluasi Tahun 2017 SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru atas kinerja tahun 2016 pada Maret 2017 ditunjukkan pada Gambar berikut ini.

Gambar 3.1
Hasil Penilaian SAKIP SKPD Tahun 2017



Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 ditargetkan 50% dari 27 SKPD yang dievaluasi memperoleh Nilai SAKIP B. Namun, setelah dilakukan evaluasi pada bulan Februari-Maret 2017 hasilnya menunjukkan bahwa 19 SKPD (70,37%) memperoleh nilai B dan hanya 8 SKPD (29,63%) memperoleh nilai CC. Daftar Hasil Evaluasi SAKIP SKPD lebih rincinya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Capaian kinerja atas IKU 1 dihitung berdasarkan rumus berikut ini.

$$\text{Capaian Kinerja IKU 1} = \frac{\text{Persentase SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP B}}{\text{Persentase SKPD yang Ditargetkan Memperoleh Nilai SAKIP B}}$$

Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan capaian kinerja IKU 1 tahun 2017 yaitu sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja IKU 1} = \frac{70,37\%}{50\%} = 140,74\%$$

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan Inspektorat selaku unsur pengawas berjalan optimal, sehingga mengakibatkan perbaikan-perbaikan implementasi SAKIP SKPD. Inspektorat tidak hanya sekedar melaksanakan evaluasi tetapi juga pembinaan. Pembinaan dilaksanakan dengan menjemput bola atau melakukan *road show* ke masing-masing SKPD tentang implementasi SAKIP. Sehingga pada akhirnya, sedikit demi sedikit para pemangku kepentingan di SKPD menyadari pentingnya implementasi SAKIP dan berkomitmen untuk mendukung terlaksananya kinerja yang baik.

Secara garis besar kinerja Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1 dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya dan target pada tahun akhir Renstra ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target Renstra Tahun 2021
		2015	2016	Target	Kinerja	Capaian	
Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1	%	160,00%	146,43%	50% B 50% CC	70,37% B 29,63% CC	140,74%	50% A

Tabel 3.6 menunjukkan perbandingan capaian IKU 1 dengan 2 tahun terakhir. Pada tahun 2015, dengan target sebesar 100% SKPD memperoleh nilai SAKIP CC, ternyata realisasi menunjukkan 60% SKPD memperoleh nilai SAKIP B dan 40% SKPD memperoleh nilai SAKIP CC dari total 28 SKPD yang dievaluasi. Kondisi tersebut menggambarkan capaian kinerja sebesar 160%. Selanjutnya pada tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja menjadi 146,43%. Pada tahun 2016 ditargetkan 100% SKPD memperoleh nilai CC tetapi realisasinya menunjukkan 46,43% memperoleh nilai SAKIP B dan 53,57% memperoleh nilai SAKIP CC.

Merujuk pada data tersebut, capaian kinerja IKU 1 dibandingkan dengan dua tahun terakhir selalu melampaui target yang ditetapkan. *Trend* ini menunjukkan optimisme untuk mencapai target di akhir tahun Renstra, yaitu 50% SKPD memperoleh nilai SAKIP A. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dari Walikota dan pemangku kepentingan SKPD. Selain itu, Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2018 akan lebih *intens* melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap SKPD sehubungan dengan implementasi SAKIP.

Walaupun telah melampaui target yang telah ditetapkan, akan diupayakan perbaikan-perbaikan kinerja sehingga tidak hanya memenuhi target kinerja Inspektorat, tetapi mampu memberikan sumbangsih atas pencapaian kinerja AKIP Pemerintah Kota Banjarbaru. Sebagai bentuk perbaikan atas capaian kinerja tahun 2017, dilaksanakan langkah tindak lanjut atas hasil capaian kinerja IKU 1 berupa strategi-strategi berikut ini.

1. Melaksanakan monitoring tertib administrasi pelaporan SAKIP setiap triwulan;

2. Melaksanakan *Road Show* ke masing-masing SKPD untuk mendorong optimalisasi atas implementasi SAKIP SKPD; dan
3. Berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi untuk mendorong dan membina implementasi SAKIP SKPD

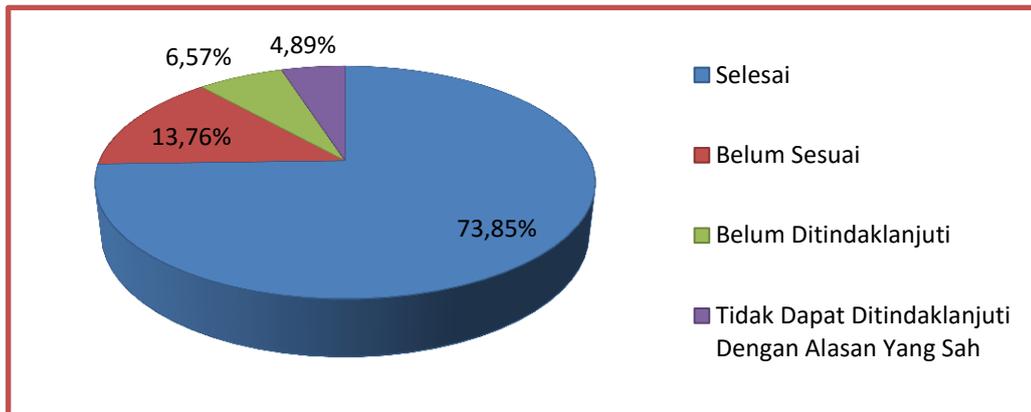
ASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)”

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)” diukur dengan menggunakan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Selesai Ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan. Indikator ini dipilih untuk memperlihatkan kinerja Inspektorat dalam memantau dan mendorong SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal khususnya BPK atas temuan yang ada pada SKPD yang bersangkutan. Realisasi atas Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan didapat dari hasil rekonsiliasi dengan pihak BPK yang dilaksanakan setiap semester. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut baru dapat diketahui status rekomendasi atas rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD.

Hasil rekonsiliasi data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Pemerintah Kota Banjarbaru pada 14 Desember 2017 menunjukkan rekapitulasi hasil pemantauan hasil pemeriksaan BPK RI pada semester II Tahun 2017. Rekapitulasi tersebut menunjukkan status rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD yang ditunjukkan pada Gambar berikut ini.

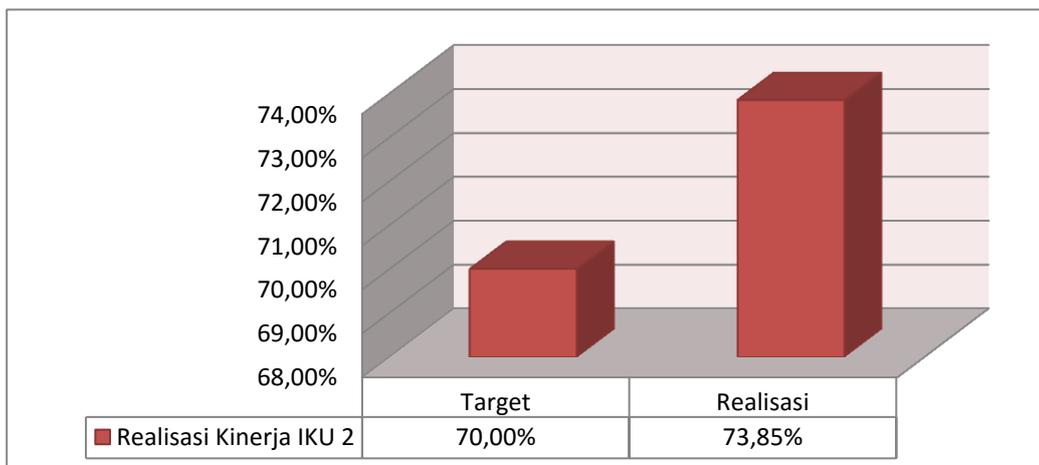
Gambar 3.2
Status Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK RI



Gambar 3.2 menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI. Sampai dengan triwulan IV tahun 2017 terdapat 654 buah rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI. Dari jumlah tersebut terdapat 483 buah rekomendasi (73,85%) yang statusnya selesai, 90 buah rekomendasi (13,76%) yang statusnya dalam proses tindak lanjut, 43 buah rekomendasi (6,57%) yang statusnya belum ditindaklanjuti, dan 38 buah rekomendasi (4,89%) yang statusnya tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yg sah oleh SKPD.

Berdasarkan data tersebut maka dapat digambarkan relaisasi kinerja IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Selesai Ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan pada tahun 2017 pada Gambar berikut ini.

Gambar 3.3
Realisasi Kinerja IKU 2 Tahun 2017



Berdasarkan Gambar 3.3, maka dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja IKU melampaui target yang telah ditentukan. Dari target sebesar 70% atas rekomendasi yang statusnya selesai ditindaklanjuti oleh SKPD, terealisasi sebesar 73,85% rekomendasi yang statusnya selesai ditindaklanjuti oleh SKPD. Sehingga capaian kinerja IKU 2 melampaui target kinerja, yaitu sebesar 105,50%.

Lebih lanjut, perbandingan capaian kinerja IKU 2 dengan dua tahun terakhir dan target akhir Renstra ditunjukkan pada tabel berikut ini.

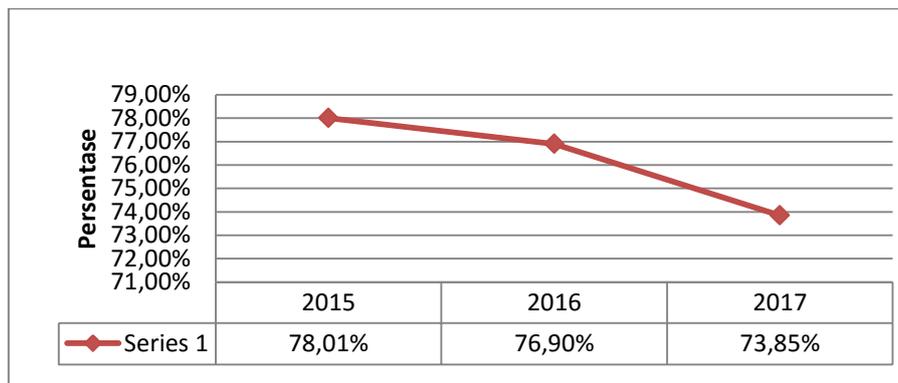
Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target Renstra Tahun 2021
		2015	2016	Target	Kinerja	Capaian	
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	%	N/A	N/A	70,00%	73,85%	105,50%	90%

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Selesai Ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator dengan tahun 2017. Pada tahun 2015 dan 2016, IKU yang digunakan ialah persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan. Indikator tersebut terdiri atas rekomendasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, APIP Provinsi Kalsel dan APIP Kota Banjarbaru. Sedangkan, pada tahun 2017 IKU terfokus pada tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, yang dapat dibandingkan dengan dua tahun terakhir yaitu realisasi kinerja atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Gambar 3.4
Trend Realisasi Kinerja IKU 2



Merujuk pada tabel 3.5, realisasi kinerja atas persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan *trend* yang menurun. Penurunan ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor yang berasal dari pihak Inspektorat selaku unsur yang melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan SKPD selaku unit kerja yang melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Inspektorat kurang optimal melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi kepada SKPD, sedangkan SKPD kurang tanggap dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan-perbaikan kinerja agar tercapainya sasaran Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) agar target akhir Renstra dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan strategi perbaikan untuk pelaksanaan kinerja tahun 2018. Strategi tersebut meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Berkoordinasi dan melibatkan Irbanwil untuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; dan
- b. Melibatkan fungsional Auditor, P2UPD, dan Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;

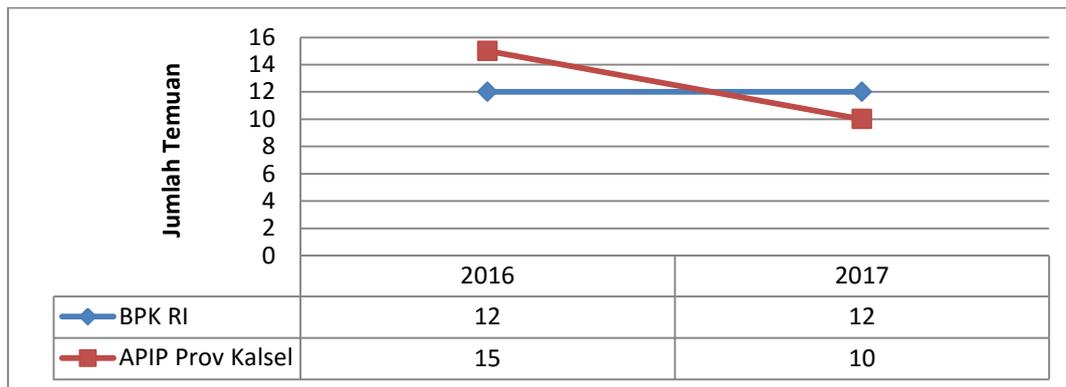
ASARAN STRATEGIS 3

“Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan”

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menggunakan IKU Persentase Penurunan Jumlah Temuan. Indikator ini dipilih untuk memperlihatkan kinerja Inspektorat dalam mengurangi jumlah temuan hasil pemeriksaan Eksternal (BPK dan APIP Provinsi Kalsel). Ketika kinerja Inspektorat meningkat dengan melakukan pengawasan dan pembinaan atas kepatuhan SKPD terhadap peraturan dan perundang-undangan, diharapkan dapat mengurangi jumlah temuan eksternal.

Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK diperoleh dari jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 dan jumlah temuan APIP Provinsi diperoleh dari jumlah temuan yang ada pada LHP Pemeriksaan Reguler pada tahun 2017. Jumlah temuan eksternal pada tahun 2016 dan 2017 ditunjukkan pada Gambar berikut ini.

Gambar 3.5
Jumlah Temuan Eksternal Tahun 2016 & 2017



Gambar 3.4 menunjukkan bahwa jumlah temuan eksternal dari hasil pemeriksaan BPK RI cenderung stagnan di dua tahun terakhir (2016 & 2017). Akan tetapi berbeda dengan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan APIP Provinsi Kalsel yang cenderung menurun drastis dari 15 buah temuan menjadi 10 buah temuan.

Persentase penurunan jumlah temuan dihitung berdasarkan rumus berikut ini.

$$\text{Persentase Penurunan Jumlah Temuan} = \frac{(\text{Jumlah temuan tahun } n - \text{Jumlah temuan tahun } n-1)}{\text{Jumlah temuan tahun } n-1} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, dapat diketahui realisasi kinerja terdapat penurunan jumlah temuan sebesar 18,52%. Sedangkan target kinerja yang ditentukan untuk tahun 2017 ialah sebesar 10%. Oleh karena itu capaian atas IKU persentase penurunan jumlah temuan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Realisasi Capaian Kinerja IKU 3

Temuan	Tahun		% Penurunan Temuan	Target	Capaian
	2016	2017			
BPK RI	12	12	0,00%	-	-
APIP Provinsi Kalsel	15	10	-33,33%	-	-
Total	27	22	-18,52%	-10%	185,19%

Berdasarkan data pada tabel 3.4, capaian kinerja untuk IKU 3, yaitu persentase penurunan jumlah temuan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target kinerja persentase penurunan sebesar 10%, terealisasi penurunan temuan sebesar 18,52%. Oleh karena itu, capaian kinerja IKU 2 pada tahun 2017 sebesar 185,19%. Hal tersebut tidak terlepas dari tingkat kepatuhan SKPD yang semakin meningkat atas ketentuan dan/atau peraturan perundangan-undangan. Serta tidak terlepas dari Inspektorat selaku SKPD pengawas dan pembinaan atas SKPD.

Secara garis besar capaian kinerja IKU 2 dibandingkan dengan dua tahun terakhir dan target akhir Renstra ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target Renstra Tahun 2021
		2015	2016	Target	Kinerja	Capaian	
Persentase Penurunan Jumlah Temuan	%	N/A	N/A	-10,00%	-18,52%	185,20%	-10%

Capaian kinerja atas IKU persentase penurunan jumlah temuan tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada dua tahun sebelumnya persentase penurunan jumlah temuan dihitung dengan memasukkan jumlah temuan APIP Kota Banjarbaru. Sedangkan pada tahun 2017 sejalan dengan perubahan IKU Inspektorat pada September 2017, terfokus pada jumlah temuan eksternal, yaitu jumlah temuan BPK RI dan APIP Prov. Kalsel.

Akan tetapi, perbandingan realisasi atas penurunan jumlah temuan dapat dilakukan dengan melihat Berita Acara Rekonsiliasi Temuan BPK RI yang dilaksanakan pada akhir semester IV. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi IKU 3

Temuan	Tahun			Persentase	
	2015	2016	2017	2016	2017
BPK RI	32	12	12	-62,50%	0,00%
APIP Provinsi Kalsel	12	15	10	25,00%	-33,33%
Total	44	27	22	-38,64%	-18,52%

Walaupun dari segi pencapaian kinerja menunjukkan *trend* yang mengalami peningkatan, akan tetapi tetap diperlukan langkah-langkah ke depan untuk mempertahankan kinerja tahun 2017. Langkah-langkah tersebut meliputi strategi berikut ini.

- a. Membuka forum konsultasi dengan SKPD;
- b. Memfasilitasi SKPD dengan instansi lain; dan
- c. Melakukan pemeriksaan tidak hanya bersifat kepatuhan tetapi juga pembinaan.

ASARAN STRATEGIS 4

“Meningkatnya Implementasi 5 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh SKPD”

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Implementasi 5 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh SKPD” diukur dengan menggunakan IKU Level Maturitas SPIP Kota Banjarbaru. Indikator ini menjelaskan tentang karakteristik penyelenggaraan SPIP ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru. Indikator ini mempunyai makna peringkat pencapaian penyelenggaraan SPIP berupa tingkat maturitas dan skor. Untuk mendapatkan capaian indikator kinerja tersebut, cara yang digunakan yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian (*Assesment*) Maturitas SPIP oleh BPKP.

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh BPKP meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan penetapan 25 fokus maturitas SPIP yaitu:

Tabel 3.11
Fokus Evaluasi Maturitas SPIP

No.	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan Pengendalian	8
2	Penilaian Risiko	2
3	Kegiatan Pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan	2
Total		25

Setiap fokus terbagi atas 5 karakter yang sifatnya menarik dari belum ada (nilai=0), rintisan (nilai=1), berkembang (nilai=2), terdefinisi (nilai=3), terkelola (nilai=4) dan optimum (nilai=5). Penentuan nilai maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan secara multi teknik. Diawali dengan pengisian kuesioner tertutup oleh responden yang dipilih dari pejabat dan pelaksana SKPD. Kuesioner yang diolah dapat memberikan nilai awal maturitas SPIP. Berdasarkan hasil tersebut, kemudian dilakukan analisis kuesioner dengan *professional judgement*. Selanjutnya dilakukan reviu dokumen secara terbatas pada dokumen yang relevan dan wawancara secara terbatas dengan personil pada SKPD.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sesuai tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Gradasi Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Belum ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan Terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai ≥ 4,5

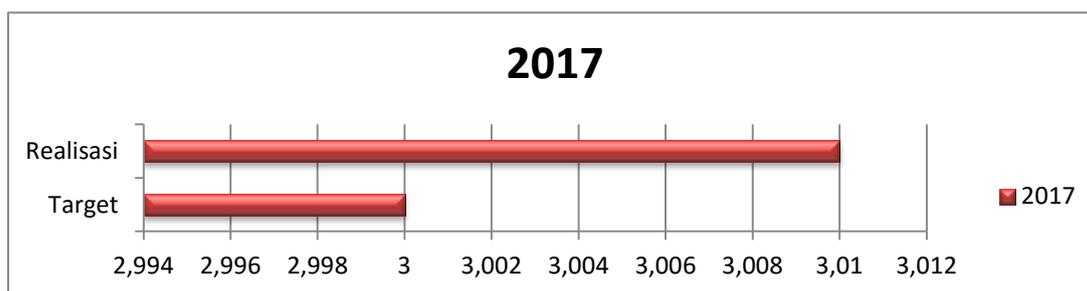
Sampai dengan 31 Januari 2018, hasil atas evaluasi Tingkat Maturitas SPIP Kota Banjarbaru belum keluar. Namun, merujuk pada Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Prov. Kalsel No. LEV-377/PW16/3/2016 tanggal 29 Agustus 2016, nilai maturitas SPIP Pemko Banjarbaru ialah 2,40. Kemudian merujuk pada Laporan Bimtek Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2017 No. LBA-461/PW16/3/2017 tanggal 11 Desember 2017, terjadi peningkatan nilai maturitas sebesar 0,6, sehingga menjadi 3,01. Peningkatan tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Nilai Maturitas SPIP Kota Banjarbaru Setelah Bimtek Penilaian Risiko

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
Unsur Lingkungan Pengendalian				
1	Penegakkan Integritas dan Penegakkan etika	3,75	3	0,11
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	2	0,08
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	3	0,11
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	4	0,15
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,75	3	0,11
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	3	0,11
7	Perwujudan APIP yang efektif	3,75	3	0,11
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	3,75	3	0,11
Unsur Penilaian Risiko				
1	Identifikasi Risiko	10,00	3	0,30
2	Analisis Risiko	10,00	3	0,30
Kegiatan Pengendalian				
1	Reviu Kinerja	2,27	3	0,07
2	Pembinaan SDM	2,27	3	0,07
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	3	0,07
4	Pengendalian Fisik dan Aset	2,27	3	0,07
5	Penetapan dan Reviu Indikator	2,27	3	0,07
6	Pemisahan Fungsi	2,27	3	0,07
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	2,27	3	0,07
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	3	0,07
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	3	0,07
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	3	0,07
11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting	2,27	3	0,07
Informasi dan Komunikasi				
1	Informasi	5	3	0,15
2	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	5	3	0,15
Unsur Pemantauan				
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	4	0,30
2	Evaluasi Terpisah	7,5	2	0,15
Jumlah Skor		100,00		3,01

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai maturitas SPIP Kota Banjarbaru sebesar 3,01 dan termasuk dalam Tingkat Maturitas “Terdefinisi”. Oleh karena itu, realisasi kinerja Tingkat maturitas SPIP Kota Banjarbaru Tahun 2017 yaitu sebagai berikut.

Gambar 3.6
Capaian IKU 4 Tahun 2017



Target IKU Tingkat Maturitas SPIP Kota Banjarbaru Tahun 2017 tahun 2017 pada tingkat berkembang dengan rentang nilai $2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$. Berdasarkan Gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja IKU Tingkat Maturitas SPIP Kota Banjarbaru Tahun 2017 melebihi target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 100,33%. Capaian kinerja tersebut didapat dengan membandingkan nilai maturitas yang didapatkan (3,01) dengan target Tingkat Maturitas yang telah ditentukan, yaitu Tingkat Berkembang dengan rentang nilai maturitas $2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$ (diambil nilai paling tinggi yaitu 3,00). Berdasarkan perhitungan rumus tersebut didapatkan capaian kinerja tahun yang bersangkutan. Sehingga pada tahun 2017 capaian kinerjanya dihitung dari $(3,01/3,00)$ dengan memperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100,33%.

Secara garis besar capaian kinerja IKU 4 dibandingkan dengan dua tahun terakhir dan target akhir Renstra ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target Renstra Tahun 2021
		2015	2016	Target	Kinerja	Capaian	
Tingkat Maturitas SPIP Kota Banjarbaru	Tingkat	N/A	120,00%	Berkembang	Terdefinisi	100,33%	Terkelola & Terukur

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diambil kesimpulan selama dua tahun terakhir (2016 & 2017) tingkat maturitas SPIP Kota Banjarbaru mengalami peningkatan. Pada tahun 2016

berada pada tingkat “Berkembang” dari target pada tingkat rintisan dengan capaian kinerja sebesar 120% (2,40/2,00). Selanjutnya pada tahun 2017 sementara berada pada tingkat “Terdefinisi” dari target kinerja berada pada tingkatan “berkembang”. Oleh karena itu, target pada akhir tahun Renstra berada pada tingkat “Terkelola dan Terukur” optimis dapat terpenuhi.

Walaupun target kinerja telah terpenuhi melampaui target, tetap diperlukan langkah-langkah strategi agar mampu mencapai target kinerja di akhir tahun renstra. Strategi tersebut merupakan rekomendasi hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP Kota Banjarbaru, yaitu sebagai berikut.

- a. Menginstruksikan kepada seluruh SKPD melakukan penilaian risiko atas kegiatan utamanya;
- b. Memonitor Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SKPD; dan
- c. Menyusun dan menyiapkan PKPT berbasis risiko.

ASARAN STRATEGIS 5

“Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru”

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru” diukur dengan menggunakan IKU Level Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru. Menurut Peraturan Kepala BPKP No. PER-1633/K/JF/2011, Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri atas tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Indikator ini dipilih sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah dalam RPJMN secara khusus memasukkan peningkatan Kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan. Hal ini juga dipertegas oleh Presiden pada Rapat

Koordinasi pengawasan Intern pada tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta. Salah satu amanat Presiden yaitu agar Kapabilitas APIP di setiap K/L/D berada pada Level 3 pada akhir tahun 2019 berdasarkan model IA-CM.

IA-CM merupakan sebuah kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Selain itu, juga menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif.

Dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas. Lima level tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Matriks Model Kapabilitas APIP

	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola
Level 5 (<i>Optimizing</i>)	APIP diakui sebagai agen perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pimpinan APIP berperanaktif dalam organisasi profesi ❖ Proyeksi tenaga/tim kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Praktik profesionalisme dikembangkan secara berkelanjutan ❖ APIP memiliki perencanaan strategis 	Laporan efektivitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus menerus	Independensi, kemampuan, dan kewenangan penuh APIP
Level 4 (<i>Managed</i>)	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen ❖ APIP mendukung organisasi profesi ❖ Perencanaan tenaga/tim kerja 	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan memengaruhi manajemen	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP ❖ Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi
Level 3 (<i>Integrated</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Layanan konsultasi ❖ Audit kinerja/ program evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Membangun tim dari kompetensinya ❖ Pegawai yang berkualifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kualitas kerangka kerja manajemen ❖ Perencanaan berbasis risiko 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengukuran kinerja ❖ Informasi biaya ❖ Pelaporan manajemen 	❖ Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP ❖ Manajemen

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ profesional ❖ Koordinasi tim 		APIP	<ul style="list-style-type: none"> ❖ penjaminan ❖ Komponen manajemen tim yang integral 	pendanaan
Level 2 (Infrastructure)	Audit ketaatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengembangan profesi individu ❖ Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya ❖ Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/ pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggaran operasional kegiatan APIP ❖ Perencanaan kegiatan APIP 	Pengelolaan organisasi APIP	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM ❖ Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 (Initial)	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik					

Sumber: Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP No. PER-1633/K/JF/2011)

Semua elemen Kapabilitas APIP dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA. Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum Kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP itu sendiri dilakukan secara mandiri (*self assesment*).

Penilaian terhadap indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dengan target tahun 2016, adalah berdasarkan Laporan Pendampingan Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2016 (Nomor LBA-638/PW16/6/2016) Tanggal 29 Desember 2016, yang dilaksanakan sejak tanggal 17 s/d 19 Oktober 2016. Berdasarkan laporan tersebut dan sampai dengan akhir tahun 2017, APIP Kota Banjarbaru masih berada pada level 2 dengan catatan. Pada tahun 2017, sesuai target Kapabilitas APIP ditargetkan masih sama berada pada Level 2. Oleh karena itu, capaian kinerja IKU 5 pada tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja IKU 5

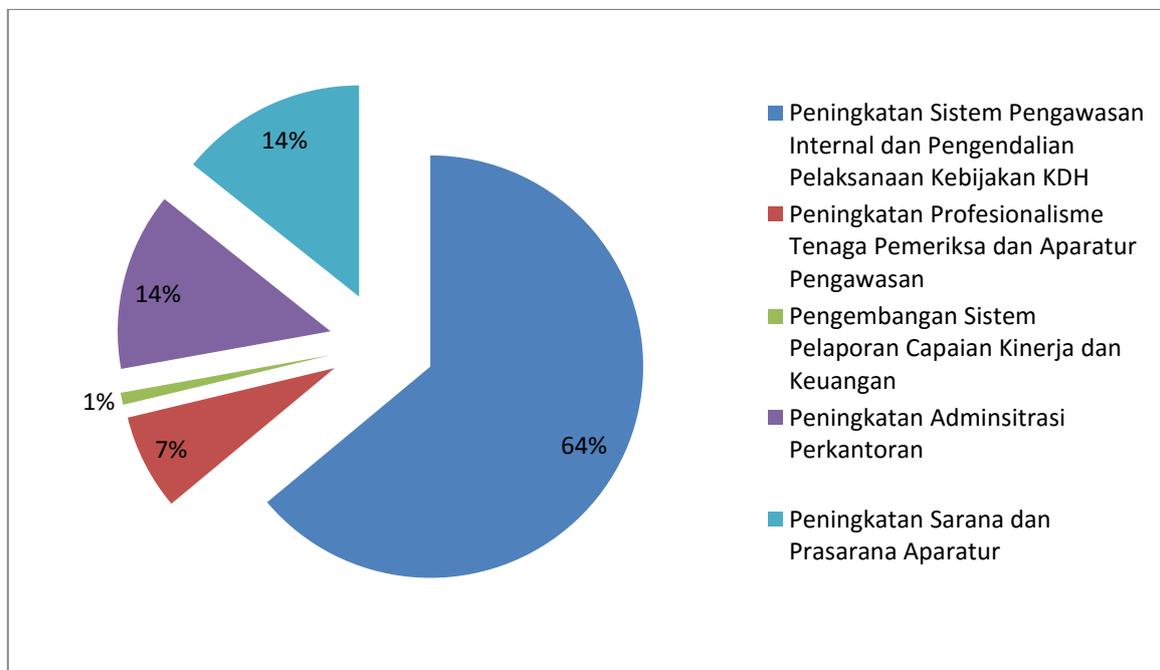
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target Renstra Tahun 2021
		2015	2016	Target	Kinerja	Capaian	
Level Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	Level	N/A	2,00	2	2	100%	4

Meskipun capaian kinerja IKU 5 terealisasi sebesar 100%, akan tetapi masih terdapat beberapa pernyataan pada Level 2 yang belum terpenuhi. Hal tersebut memperlambat untuk memenuhi pernyataan-pernyataan di Level 3. Hal tersebut dikarenakan kurang koordinasi antar Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP dan kurangnya komitmen di lingkup Inspektorat Kota Banjarbaru untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

3.2.3 Realisasi Keuangan

Realiasi kinerja tidak terlepas dari realisasi keuangan sebagai pendorong terlaksananya kinerja yang telah ditargetkan. Pada tahun 2017, realisasi anggaran Inspektorat yaitu sebesar Rp9.144.160.148 atau sebesar 97,11% dari total anggaran sebesar Rp9.416.762.300. Untuk lebih rinci, realisasi anggaran akan diuraikan ke dalam masing-masing program, dan jenis belanja. Uraian tersebut dapat digambarkan berikut ini.

Gambar 3.7
Persentase Realisasi Keuangan Per Program



Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.602.440.000	2.410.451.250	92,62%
2.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	287.000.000	276.279.975	96,26%
3.	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34.969.000	34.699.500	99,23%
4.	Peningkatan Adminstrasi Perkantoran	540.361.300	513.558.333	
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	570.490.000	537.049.750	94,14%

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	Rp6.016.732.000	Rp5.943.141.230	98,78%
2.	Belanja Barang & Jasa	Rp2.985.940.300	Rp2.790.798.808	93,46%
3.	Belanja Modal	Rp414.090.000	Rp408.740.000	98,71%

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	540.631.300	513.558.333	94,99%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	13.440.000	10.913.904	81,20%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.800.000	27.600.000	95,83%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.400.800	25.380.400	99,92%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.108.000	20.103.000	99,98%

6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.998.600	29.998.600	100,00%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000	8.640.000	100,00%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	84.419.000	79.795.000	94,52%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	259.635.000	255.798.029	98,52%
10	Penyediaan Jasa Non PNS	49.200.000	34.350.000	69,82%
11	Pendataan LP2P	19.489.900	19.479.400	99,95%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	570.490.000	537.049.750	94,14%
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	65.370.000	63.760.000	97,54%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	57.760.000	56.210.000	97,32%
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	35.000.000	30.416.200	86,90%
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	80.900.000	59.893.550	74,03%
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	3.750.000	75,00%
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	33.500.000	33.500.000	100,00%
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	2.000.000	750.000	37,50%
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	290.960.000	288.770.000	99,25%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34.969.000	34.699.500	99,23%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	22.184.000	21.922.500	98,82%
2	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/ Barang	12.785.000	12.777.000	99,94%
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	287.000.000	276.279.975	96,26%
1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	35.000.000	25.400.000	72,57%
2	Diklat Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	252.000.000	250.879.975	99,56%
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.602.440.000	2.410.451.250	92,62%

1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	799.752.750	786.970.900	98,40%
2	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	226.455.000	225.866.000	99,74%
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	815.089.000	737.954.500	90,54%
4	Review RKA SKPD	66.047.500	61.835.500	93,62%
5	Review Laporan Keuangan	59.928.750	58.088.750	96,93%
6	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	125.954.000	61.154.000	48,55%
7	Pengawasan Inventarisasi Aset	127.393.000	123.492.600	96,94%
8	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	110.000.000	85.569.000	77,79%
9	Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD Pada Akhir Tahun	62.615.000	60.315.000	96,33%
10	Evaluasi Lakip SKPD	209.205.000	209.205.000	100,00%
Total		Rp 4.035.530.300	Rp 3.772.038.808	93,47%

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Lkj Inspektorat Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu juga mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Penghitungan capaian kinerja tahun 2017 telah dilakukan melalui perbandingan realisasi dengan target sesuai Perjanjian Kinerja, baik oleh Eselon II, Eselon III, maupun Eselon IV. Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut.

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

Sasaran Strategis	Capaian IKU	Predikat Capaian Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	140,74%%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan	105,50%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap ketentuan dan/atau peartauran perundang-undangan	185,20%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya implementasi 5 unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh SKPD	103,68%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	100%	Sangat Memuaskan

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa lima IKU berada pada predikat sangat memuaskan. Bahkan, empat dari 5 IKU sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2017 memenuhi target kinerja. Bahkan 4 dari 5 IKU melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Namun, kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut masih diperlukan

penyempurnaan lebih lanjut. LKj Inspektorat Tahun 2017 diharapkan sebagai pemacu peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Sehingga, pada akhirnya mampu mencapai target pada akhir tahun Renstra. Selain itu, Lkj ini juga diharapkan sebagai bahan umpan balik untuk perumusan strategi yang lebih baik di masa yang akan datang.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Secara garis besar keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja Inspektorat di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2017, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Inspektorat yaitu sebagai berikut.

1. Mempertegas kembali komitmen SKPD dalam menindak lanjuti rekomendasi yang belum/masih dalam proses penyelesaian;
2. Melakukan pengawasan yang intensif melalui kegiatan monitoring tindak lanjut temuan pengawasan;
3. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak internal dalam lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya mendukung ketercapaian sasaran strategis Pemko Banjarbaru;
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga Pengawas Eksternal dalam hal ini BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya mendukung peningkatan level Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru;
5. Membuka peluang konsultasi dan pembinaan yang lebih optimal ke tiap-tiap SKPD.

Banjarbaru, 31 Januari 2018

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19700615 199003 1 006

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI KINERJA SKPD TAHUN 2016

No	SKPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Kinerja	Hasil	Kategori
		Satuan dalam (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum	21,08	13,13	11,56	5,79	13,25	64,80	B
2	BKD dan Diklat	21,23	14,06	9,77	6,73	13,50	65,24	B
3	Dinas Pendidikan	20,7	13,13	9,77	5,62	11,01	60,29	B
4	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	19,29	11,88	8,51	6,85	13,10	59,63	CC
5	RSUD	20,0	13,44	9,13	6,48	13,65	62,74	B
6	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan	18,32	13,75	11,56	4,83	12,39	60,85	B
7	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	20,05	11,56	9,75	6,35	13,50	61,21	B
8	Badan Satpol PP	19,99	12,19	8,68	6,35	13,30	60,51	B
9	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	19,81	14,06	12,46	5,21	8,48	60,02	B
10	Sekretariat Daerah	21,01	14,06	11,93	4,92	9,60	61,52	B
11	Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Wasbang	19,86	13,75	9,32	6,85	13,04	62,82	B
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20,78	12,81	11,29	5,79	11,25	61,91	B
13	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	21,24	13,44	12,46	6,49	11,57	65,20	B
14	Inspektorat	22	14,38	9,86	5,62	12,10	63,96	B
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19,94	11,56	8,86	6,35	12,50	59,21	CC
16	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	19,44	11,88	8,51	6,85	13,04	59,71	CC
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	20,39	14,38	11,56	6,58	8,46	62,35	B
18	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	18,52	14,06	12,46	4,92	10,20	60,16	B
19	Badan Perencana dan Pembangunan Daerah	21,08	13,13	11,56	5,62	11,25	62,63	B
20	BPMP dan KB	19,83	11,25	8,51	6	11,25	56,83	CC
21	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	19,04	12,19	8,33	5,79	10,50	55,84	CC
22	Sekretariat DPRD	19,35	12,19	8,51	6,50	11,30	57,84	CC
23	Dinas Kesehatan	18,21	14,06	9,05	6,43	13,09	60,86	B
24	Badan Kependudukan dan Catatan Sipil	19,40	12,19	8,78	7,06	12,50	59,93	CC
25	Sekretariat KORPRI	18,25	10,94	8,33	6	10,75	54,26	CC

26	Dinas Koperasi dan UMKM	20,52	14,38	9,24	7,43	8,83	60,19	B
27	Badan Lingkungan Hidup	18,62	14,38	12,45	4,58	13,25	63,96	B

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Lampiran 3

AUDITAMA / PERWAKILAN BPK : Auditorat Utama Keuangan Negara VI / BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
 ENTITAS : Pemkot Banjarbaru

Rectangular Snip

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
					Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2005	13	IDR 1,343,332,500.00	13	IDR 1,343,332,500.00	8	IDR 45,250,000.00	0	IDR 1,298,082,500.00	0	IDR 0.00	5	IDR 0.00	IDR 45,250,000.00
2006	32	IDR 973,932,795.00	45	IDR 973,932,795.00	43	IDR 742,665,795.00	0	IDR 222,165,000.00	0	IDR 0.00	2	IDR 9,102,000.00	
2007	25	IDR 196,335,080.26	36	IDR 196,335,080.26	32	IDR 187,976,978.00	0	IDR 5,358,102.26	0	IDR 0.00	4	IDR 3,000,000.00	
2008	30	IDR 825,615,256.47	55	IDR 825,615,256.47	54	IDR 549,740,256.47	0	IDR 227,935,000.00	0	IDR 0.00	1	IDR 47,940,000.00	
2009	14	IDR 67,000,000.00	24	IDR 67,000,000.00	24	IDR 67,000,000.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	0	IDR 0.00	
2010	34	IDR 1,143,476,569.78	60	IDR 1,140,374,021.78	59	IDR 1,102,866,700.29	0	IDR 37,507,321.49	0	IDR 0.00	1	IDR 0.00	IDR 1,124,424,781.66
2011	21	IDR 27,195,539.53	54	IDR 27,195,539.53	52	IDR 5,236,324.20	0	IDR 21,959,215.33	0	IDR 0.00	2	IDR 0.00	IDR 27,195,539.53
2012	20	IDR 22,849,525,951.65	75	IDR 6,171,782,718.65	68	IDR 5,847,447,518.65	0	IDR 324,335,200.00	0	IDR 0.00	7	IDR 0.00	IDR 6,321,881,037.32
2013	23	IDR 4,194,341,337.47	68	IDR 3,948,212,632.33	52	IDR 1,385,833,586.29	0	IDR 2,388,886,817.75	0	IDR 0.00	16	IDR 173,492,228.29	IDR 1,601,554,009.86
2014	23	IDR 13,572,382,256.29	80	IDR 1,798,264,523.29	28	IDR 259,016,786.67	51	IDR 1,539,247,736.62	1	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 169,935,086.67
2015	32	IDR 731,511,756.96	72	IDR 731,511,756.96	34	IDR 424,914,515.00	22	IDR 306,597,241.96	16	IDR 0.00	0	IDR 0.00	
2016	12	IDR 1,122,215,876.25	24	IDR 253,549,336.49	12	IDR 0.00	7	IDR 253,549,336.49	5	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 862,766,539.76
2017	12	IDR 551,858,301.10	48	IDR 63,098,836.56	17	IDR 0.00	10	IDR 63,098,836.56	21	IDR 0.00	0	IDR 0.00	IDR 488,759,479.33
Jumlah	291	IDR 47,598,723,220.76	654	IDR 17,540,204,997.32	483	IDR 10,617,948,460.57	90	IDR 6,688,722,308.46	43	IDR 0.00	38	IDR 233,534,228.29	IDR 10,841,766,474.13

Ket: Lampiran 3 Pemerintah Kota Banjarbaru per 14 Desember 2017

Lampiran 3 Nilai Maturitas SPIP Kota Banjarbaru

b) Analisis Risiko

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas hasil Identifikasi Risiko yang dilakukan dalam bentuk rencana aksi dapat dilihat pada lampiran 8.

Hasil Kegiatan dan Saran

Berdasarkan Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pada Bulan Juli 2016, sesuai dengan Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan nomor LEV-377/PW16/3/2016 tanggal 29 Agustus 2016, nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Banjarbaru adalah 2,40. Setelah dilakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Surat Tugas ST-533/PW16/3/2017 tanggal 5 September 2017 perihal Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Kota Banjarbaru, Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Banjarbaru terjadi peningkatan sebesar 0,6 yaitu menjadi 3,01, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Kondisi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Sebelum dan Setelah Bimtek Penilaian Risiko**

No	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai (Sebelum)	Nilai	Klasifikasi Nilai (Setelah)	Nilai
1	Unsur Lingkungan Pengendalian					
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	3	0,11	3	0,11
2	Komitmen terhadap Kompetensi	3,75	2	0,08	2	0,08
3	Kepemimpinan yang kondusif	3,75	3	0,11	3	0,11
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	4	0,15	4	0,15
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,75	3	0,11	3	0,11
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	3	0,11	3	0,11
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,75	3	0,11	3	0,11
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	3	0,11	3	0,11
II	Unsur Penilaian Risiko					
1	Identifikasi Risiko	10,00	0	0,00	3	0,30
2	Analisa Risiko	10,00	0	0,00	3	0,30
III	Kegiatan Pengendalian					
1	Reviu Kinerja	2,27	3	0,07	3	0,07
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,27	3	0,07	3	0,07
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	3	0,07	3	0,07
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	3	0,07	3	0,07
5	Penetapan dan Reviu Indikator	2,27	3	0,07	3	0,07
6	Pemisahan Fungsi	2,27	3	0,07	3	0,07
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian	2,27	3	0,07	3	0,07

Lampiran 4 Penilaian Kapabilitas APIP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Jend. A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru 70711
Telepon (0511) 4781116, Faximile (0511) 4774501
E-mail : kalsel@bpkp.go.id, Website : www.bpkp.go.id/kalsel

Nomor : LBA-638/PW16/6/2016 29 Desember 2016
Lampiran : Satu lembar
Hal : Laporan Pendampingan
Peningkatan Kapabilitas APIP
pada Inspektorat Kota Banjarbaru

Ke Walikota Banjarbaru
di Banjarbaru

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Pendampingan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Banjarbaru sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

- Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ST-210/PW16/6/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

2. Tujuan dan Sasaran

Pendampingan peningkatan kapabilitas APIP diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas APIP di lingkungannya.

Sasaran kegiatan ini adalah membantu Inspektorat menyiapkan infrastruktur dalam rangka penerapan tata kelolanya menuju ke level 2 (dua) penuh.

3. Kondisi Sebelum Pendampingan

Hasil pelaksanaan evaluasi mandiri (*self Assesment*) oleh Inspektorat Kota Banjarbaru pada triwulan tiga atau pada bulan September 2016 menunjukkan

bahwa setiap elemen tata kelola menurut IACM yang dinilai berada pada level yang berbeda yaitu:

a. Level 2 yaitu:

- Elemen I: Peran dan Layanan
- Elemen III: Praktik Profesional
- Elemen IV: Akuntabilitas dan Manajemen
- Elemen V; Budaya dan Hubungan Organisasi
- Elemen VI: Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

b. Level 1 yaitu elemen II: Pengelolaan SDM (*People Management*)

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi mandiri tersebut dilaksanakan tahap pendampingan peningkatan kapabilitas APIP. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan analisis *area of improvement* serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh APIP dalam upaya meningkatkan kapabilitas tata kelola untuk menuju level 2 (*infrastructure*), dengan harapan agar seluruh unsur pimpinan dan pegawai Inspektorat Kota Banjarbaru memiliki pemahaman yang sama.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan peningkatan kapabilitas APIP dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap APIP di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru. Pelaksanaan pendampingan pada Inspektorat Kota Banjarbaru dilakukan di Aula Inspektorat Kota Banjarbaru selama 3 (tiga) hari berturut-turut mulai 17 Oktober 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016.

Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan adalah menyusun PKPT sesuai dengan skala prioritas kegiatan APIP.

Dalam standar audit pengendalian mutu perencanaan pengawasan, penyusunan PKPT dilakukan dengan skala prioritas atas kegiatan yang mempunyai resiko yang terbesar dan harus dikomunikasikan kepada para pimpinan organisasi di lingkungan organisasi APIP dan unit-unit terkait.

Selanjutnya Inspektorat Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan terhadap hasil SKPD yang dibagi dalam empat wilayah. Penyusunan jadwal pemeriksaan Inspektorat Kota Banjarbaru telah memperhatikan jadwal pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan agar tidak

berbenturan. Namun penyusunan PKPT belum memperhatikan faktor risiko. Terhadap hal tersebut, BPKP sebagai Pembina APIP telah melakukan pembinaan untuk penyusunan PKPT berbasis risiko kepada seluruh pejabat di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru. Penyusunan peta audit ini dibatasi hanya penetapan faktor risiko saja yang bisa dilihat dari beberapa indikator misalnya anggaran, kompleksitas pekerjaan, kualitas SDM, dan lokasi. Sedangkan penilaian risiko EKPD pada Pemerintah Kota Banjarbaru belum disusun.

Sementara itu tata kelola APIP terhadap Infrastruktur yang perlu dibangun untuk meningkatkan kapabilitas menjadi level 2 (*infrastructure*) penuh yaitu:

- a. Membuat pedoman kendali mutu APIP sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Pedoman kendali mutu diperlukan APIP untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang handal sehingga memiliki arah kebijakan yang jelas dalam setiap kegiatan. Pedoman kendali mutu akan mengarahkan proses kegiatan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, supervisi, sampai dengan tindak lanjut.
- b. Membuat peta kompetensi untuk seluruh auditor di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru dan SOP tentang penyusunan peta kompetensi.
Penyusunan peta kompetensi diperlukan bagi pimpinan organisasi untuk dapat mengidentifikasi kompetensi pegawai baik pengetahuan, keahlian teknis, sikap, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.
- c. Membuat SOP non pengawasan sesuai kebutuhan internal organisasi
Penyusunan SOP non pengawasan, baik dalam bentuk peraturan maupun surat keputusan, diperlukan sebagai bentuk kebijakan untuk mendukung kegiatan pengawasan. SOP non pengawasan tersebut bisa berupa kebijakan penyelenggaraan *training*, kebijakan SDM, manajemen informasi, keuangan, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan organisasi.
- d. Menyusun PKPT yang mencantumkan staf yang akan melaksanakan tugas, jumlah biaya yang disediakan untuk menyelesaikan penugasan, dan sarana prasarana yang diperlukan.
Inspektorat Kota Banjarbaru belum menyusun PKPT dengan pertimbangan

jumlah staf, yang akan melaksanakan penugasan, jumlah biaya yang disediakan untuk menyelesaikan penugasan, dan sarana prasarana yang diperlukan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya *draft* PKPT yang mencantumkan jumlah staf yang melaksanakan, jumlah biaya yang disediakan dan sarana prasaran yang diperlukan.

- Memperbaiki SOP pengawasan mengenai kewenangan APIP dalam mengakses informasi, aset dan personil organisasi pemda sebagaimana tertuang dalam *internal audit charter* dan tindakan auditor apabila auditan tidak memberikan dokumen yang diperlukan.

Pembaharuan SOP pengawasan perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa APIP memiliki kebijakan dan prosedur formal terkait dengan kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas seluruh informasi, aset, dan personil organisasi Pemda yang diaudit serta APIP dapat menetapkan prosedur yang harus diikuti jika auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Walikota kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Muhammad Masykur
NIP. 19640227 198402 1 001

Alamat:
1. Gedung Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Jemberan, Daerah Kota Banjarbaru;
3. Banjarbaru Kota Banjarbaru.